



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Hukum Tua dan Perangkat Desa melalui penyesuaian penghasilan tetap serta pemberian tunjangan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa Selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan untuk Desa yang diambil paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Hukum Tua adalah Kepala Desa di Kabupaten Minahasa Utara.
7. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. f

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Penghasilan Tetap selanjutnya disebut Siltap adalah Dana yang wajib dibayarkan kepada Hukum Tua dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
12. Tunjangan BPD selanjutnya disingkat TBPD adalah tunjangan kedudukan anggota BPD yang diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
13. Dana Operasional adalah dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersumber dari ADD setelah dikurangi Siltap dan TBPD.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa penerima ADD sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Desa.

BAB III PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Rincian ADD Tahun Anggaran 2022 dialokasi untuk :

- a. Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa;
- b. TBPD; dan
- c. Operasional Pemerintahan Desa.

Pasal 4

- (1) Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa sebagaimana f

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Besaran Siltap Hukum Tua di tetapkan sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan/orang;
 - b. Siltap Perangkat Desa diuraikan sebagai berikut :
 1. besaran Siltap sekretaris Desa ditetapkan sebesar Rp.2.224.000 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) perbulan/orang; dan
 2. besaran Siltap perangkat Desa lainnya terdiri dari kepala urusan, kepala seksi, kepala jaga ditetapkan sebesar Rp.2.022.000 (dua juta dua puluh dua ribu rupiah) perbulan/orang.
- (2) Penetapan besaran Siltap Hukum Tua dan perangkat Desa didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 5

TBPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan berupa tunjangan jabatan dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tunjangan ketua BPD sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan/orang;
- b. tunjangan wakil ketua BPD sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan/orang;
- c. tunjangan sekretaris BPD sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perorang/bulan; dan
- d. tunjangan anggota BPD sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perorang/bulan.

Pasal 6

- (1) Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sisa ADD setelah dikurangi Siltap Hukum Tua dan perangkat Desa, TBPD.
- (2) Operasional Pemerintah Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 90% (sembilan puluh persen) dana operasional dibagi merata.
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

- (5) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dihitung dengan bobot dan data perhitungan :
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (6) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Daerah.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Daerah.

AF Kab = Alokasi formula Daerah.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) ADD ditetapkan sebesar Rp.51.307.836.800 (lima puluh satu milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang dibagikan ke 125 (seratus dua puluh lima) Desa.
- (2) Penetapan rincian ADD untuk Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa (Siltap) sebesar Rp.44.587.128.000 (empat puluh empat milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang di bayarkan selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Penetapan rincian ADD untuk TBPD sebesar Rp.5.721.000.000 (lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan selama 12 bulan.
- (4) Penetapan rincian ADD untuk Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp.999.708.800 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 8

Pembagian penetapan rincian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN ADD

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa, TBPD, disalurkan setiap bulannya dan/atau paling lambat per triwulan.
- (3) Penyaluran operasional dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyaluran Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa dan TBPD dari RKUD ke RKD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Siltap, TBPD sampai bulan Januari, Februari, Maret, disalurkan paling cepat per bulannya dan paling lambat akhir bulan Maret, setelah Desa menyampaikan persyaratan penyaluran yang berupa :
 1. dokumen peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2022; dan
 2. dokumen capaian kinerja bulan Oktober sampai dengan Desember tahun sebelumnya;
 - b. Siltap dan TBPD bulan April, Mei, Juni, disalurkan paling cepat di setiap bulannya dan paling lambat awal bulan Juli, setelah Desa menyampaikan persyaratan penyaluran yang berupa dokumen capaian kinerja dan rekap daftar hadir perangkat Desa bulan Januari sampai dengan bulan Maret;
 - c. Siltap dan TBPD, bulan Juli, Agustus, September, disalurkan paling cepat di setiap bulannya dan paling lambat awal bulan Oktober, setelah Desa menyampaikan persyaratan penyaluran yang berupa dokumen capaian kinerja dan rekap daftar hadir perangkat Desa bulan April, Mei Juni; dan
 - d. Siltap dan TBPD, bulan Oktober Sampai dengan bulan Desember, disalurkan paling cepat di setiap bulannya dan paling lambat awal bulan Desember, setelah Desa menyampaikan persyaratan penyaluran yang berupa dokumen capaian kinerja dan rekap daftar hadir perangkat Desa bulan Juli, Agustus, September.
- (5) Penyaluran dana operasional Pemerintahan Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Hukum Tua memasukkan dokumen persyaratan pencairan yaitu : {

- a. Dokumen peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2022; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik .

Pasal 10

Hukum Tua sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggung jawab atas keseluruhan penggunaan ADD.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI REGULER

Pasal 11

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa dana di RKD; dan/atau
- b. penyerapan dana.

Pasal 12

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi ditemukan sisa ADD di RKD Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Hukum Tua mengenai sisa dana di RKD; dan/atau
 - b. meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Hukum Tua wajib menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Siltap, TBPD dan operasional yang belum terbayarkan tahun 2022 wajib dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (2) Desa wajib menganggarkan kembali pada APB Desa tahun berikutnya sebagai SILPA.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Minahasa Utara. f

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 22 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA,



RIVINO WANGANIA LENGKONG DONDOKAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 7

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Bupati | D.h. mohon ditandatangani |
| Wakil Bupati | f |
| Pj. Sekretaris Daerah | nb |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | f |
| Kabag Hukum | rk |
| Kadis Sosial PMD | ts |
| Sekretaris Dinas Sosial PMD | ts |
| Kabid Pemerintahan Desa | rs |

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2022

**RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Kecamatan Kema

| NO | DESA | SILTAP | TUNJANGAN BPD | OPERASIONAL PEMDES | JUMLAH ADD PERDESA |
|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Makalisung | 327.192.000 | 35.400.000 | 7.992.700 | 370.584.700 |
| 2 | Waleo | 351.456.000 | 47.400.000 | 8.304.200 | 407.160.200 |
| 3 | Lilang | 302.928.000 | 35.400.000 | 8.052.100 | 346.380.100 |
| 4 | Lansot | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.763.400 | 321.827.400 |
| 5 | Kema III | 545.568.000 | 59.400.000 | 8.862.600 | 613.830.600 |
| 6 | Kema II | 448.512.000 | 59.400.000 | 8.142.800 | 516.054.800 |
| 7 | Kema I | 472.776.000 | 59.400.000 | 8.707.300 | 540.883.300 |
| 8 | Tontalete | 375.720.000 | 59.400.000 | 8.807.400 | 443.927.400 |
| 9 | Tontaalete Rok-rok | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.844.400 | 321.908.400 |
| 10 | Waleo Dua | 327.192.000 | 35.400.000 | 8.138.200 | 370.730.200 |
| Sub Total | | 3.708.672.000 | 462.000.000 | 82.615.100 | 4.253.287.100 |
| Kecamatan Kauditan | | | | | |
| 11 | Kauditan II | 521.304.000 | 59.400.000 | 8.366.200 | 589.070.200 |
| 12 | Kauditan I | 424.248.000 | 59.400.000 | 8.295.900 | 491.943.900 |
| 13 | Kawiley | 448.512.000 | 47.400.000 | 8.078.800 | 503.990.800 |
| 14 | Treman | 642.624.000 | 59.400.000 | 8.828.000 | 710.852.000 |
| 15 | Kaima | 594.096.000 | 59.400.000 | 8.271.400 | 661.767.400 |
| 16 | Karegesan | 448.512.000 | 59.400.000 | 8.325.900 | 516.237.900 |
| 17 | Kaasar | 399.984.000 | 47.400.000 | 7.827.200 | 455.211.200 |
| 18 | Lembean | 351.456.000 | 47.400.000 | 7.610.200 | 406.466.200 |
| 19 | Paslaten | 351.456.000 | 47.400.000 | 7.719.200 | 406.575.200 |
| 20 | Tumaluntung | 642.624.000 | 59.400.000 | 8.424.200 | 710.448.200 |
| 21 | Watudambo | 472.776.000 | 59.400.000 | 7.973.600 | 540.149.600 |
| 22 | Watudambo Dua | 448.512.000 | 59.400.000 | 8.523.000 | 516.435.000 |
| Sub Total | | 5.746.104.000 | 664.800.000 | 98.243.600 | 6.509.147.600 |
| Kecamatan Airmadidi | | | | | |
| 23 | Tanggari | 399.984.000 | 47.400.000 | 8.679.600 | 456.063.600 |
| 24 | Sampiri | 327.192.000 | 47.400.000 | 7.966.800 | 382.558.800 |
| 25 | Sawangan | 424.248.000 | 59.400.000 | 7.986.900 | 491.634.900 |
| Sub Total | | 1.151.424.000 | 154.200.000 | 24.633.300 | 1.330.257.300 |
| Kecamatan Wori | | | | | |
| 26 | Tiwoho | 399.984.000 | 47.400.000 | 8.066.700 | 455.450.700 |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 27 | Wori | 594.096.000 | 59.400.000 | 8.266.900 | 661.762.900 |
| 28 | Kima Bajo | 351.456.000 | 47.400.000 | 7.695.400 | 406551400 |
| 29 | Talawaan Bantik | 375.720.000 | 47.400.000 | 8.070.900 | 431.190.900 |
| 30 | Talawaan Atas | 302.928.000 | 35.400.000 | 8.062.900 | 346.390.900 |
| 31 | Budo | 327.192.000 | 35.400.000 | 7.746.400 | 370338400 |
| 32 | Darunu | 327.192.000 | 35.400.000 | 7.744.700 | 370.336.700 |
| 33 | Mantehage III Tinongko | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.634.000 | 321.698.000 |
| 34 | Nain | 521.304.000 | 59.400.000 | 8.245.200 | 588.949.200 |
| 35 | Mantehage/Buhias | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.661.400 | 321.725.400 |
| 36 | Mantehage/Bango | 254.400.000 | 35.400.000 | 7.999.200 | 297.799.200 |
| 37 | Mantehage II Tangkasi | 254.400.000 | 35.400.000 | 7.767.400 | 297.567.400 |
| 38 | Kulu | 399.984.000 | 47.400.000 | 7.851.500 | 455.235.500 |
| 39 | Bulo | 327.192.000 | 35.400.000 | 7.648.800 | 370.240.800 |
| 40 | Lansa | 375.720.000 | 47.400.000 | 7.837.400 | 430.957.400 |
| 41 | Lantung | 302.928.000 | 35.400.000 | 7.679.500 | 346.007.500 |
| 42 | Pontoh | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.742.100 | 321.806.100 |
| 43 | Minaesa | 424.248.000 | 47.400.000 | 7.851.600 | 479.499.600 |
| 44 | Nain Tatampi | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.992.300 | 322.056.300 |
| 45 | Nain Satu | 302.928.000 | 35.400.000 | 7.761.700 | 346.089.700 |
| Sub Total | | 6.956.328.000 | 828.000.000 | 157.326.000 | 7.941.654.000 |
| Kecamatan Dimembe | | | | | |
| 46 | Matungkas | 472.776.000 | 59.400.000 | 8.407.000 | 540.583.000 |
| 47 | Laikit | 375.720.000 | 59.400.000 | 7.873.900 | 442.993.900 |
| 48 | Klabat | 399.984.000 | 59.400.000 | 8.244.500 | 467.628.500 |
| 49 | Pinilih | 302.928.000 | 47.400.000 | 8.303.400 | 358.631.400 |
| 50 | Tatelu | 351.456.000 | 59.400.000 | 8.558.700 | 419.414.700 |
| 51 | Warukapas | 497.040.000 | 59.400.000 | 8.342.000 | 564.782.000 |
| 52 | Tetey | 351.456.000 | 47.400.000 | 7.801.300 | 406.657.300 |
| 53 | Wasian | 497.040.000 | 59.400.000 | 8.718.400 | 565.158.400 |
| 54 | Lumpias | 375.720.000 | 47.400.000 | 7.796.500 | 430.916.500 |
| 55 | Dimembe | 375.720.000 | 59.400.000 | 8.367.600 | 443.487.600 |
| 56 | Tatelu Rondor | 278.664.000 | 47.400.000 | 7.956.100 | 334.020.100 |
| Sub Total | | 4.278.504.000 | 605.400.000 | 90.369.400 | 4.974.273.400 |
| Kecamatan Likupang Barat | | | | | |
| 57 | Gangga I | 399.984.000 | 47.400.000 | 8.007.300 | 455.391.300 |
| 58 | Gangga II | 278.664.000 | 35.400.000 | 8.149.600 | 322.213.600 |
| 59 | Talise | 254.400.000 | 35.400.000 | 8.099.400 | 297.899.400 |
| 60 | Airbanua | 278.664.000 | 35.400.000 | 8.083.300 | 322.147.300 |
| 61 | Palaes | 351.456.000 | 47.400.000 | 8.769.800 | 407.625.800 |
| 62 | Maliambao | 302.928.000 | 35.400.000 | 7.700.100 | 346.028.100 |
| 63 | Termaal | 302.928.000 | 35.400.000 | 7.740.800 | 346.068.800 |
| 64 | Paputungan | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.879.400 | 321.943.400 |
| 65 | Jayakarsa | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.708.800 | 321.772.800 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 66 | Tanah Putih | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.964.700 | 322.028.700 |
| 67 | Bahoi | 254.400.000 | 35.400.000 | 7.683.800 | 297.483.800 |
| 68 | Tarabitan | 327.192.000 | 35.400.000 | 7.711.200 | 370.303.200 |
| 69 | Serei | 327.192.000 | 47.400.000 | 8.289.600 | 382.881.600 |
| 70 | Sonsilo | 254.400.000 | 35.400.000 | 7.700.300 | 297.500.300 |
| 71 | Mubune | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.690.400 | 321.754.400 |
| 72 | Munte | 375.720.000 | 47.400.000 | 8.028.600 | 431.148.600 |
| 73 | Bulutui | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.807.300 | 321.871.300 |
| 74 | Wawunian | 254.400.000 | 35.400.000 | 8.034.300 | 297.834.300 |
| 75 | Kinabuhutan | 302.928.000 | 47.400.000 | 8.421.200 | 358.749.200 |
| 76 | Tambun | 278.664.000 | 35.400.000 | 8.141.100 | 322.205.100 |
| Sub Total | | 5.937.240.000 | 768.000.000 | 159.611.000 | 6.864.851.000 |
| Kecamatan Likupang Timur | | | | | |
| 77 | Likupang I | 351.456.000 | 59.400.000 | 8.234.800 | 419.090.800 |
| 78 | Likupang II | 399.984.000 | 59.400.000 | 8.269.700 | 467.653.700 |
| 79 | Serawet | 327.192.000 | 47.400.000 | 8.141.200 | 382.733.200 |
| 80 | Wineru | 302.928.000 | 47.400.000 | 7.840.200 | 358.168.200 |
| 81 | Maen | 351.456.000 | 47.400.000 | 7.852.500 | 406.708.500 |
| 82 | Winuri | 351.456.000 | 47.400.000 | 8.124.600 | 406.980.600 |
| 83 | Marinsow | 254.400.000 | 35.400.000 | 7.867.000 | 297.667.000 |
| 84 | Pulisan | 254.400.000 | 35.400.000 | 7.676.400 | 297.476.400 |
| 85 | Kalinaun | 351.456.000 | 47.400.000 | 7.732.700 | 406.588.700 |
| 86 | Rinondoran | 327.192.000 | 47.400.000 | 7.844.000 | 382.436.000 |
| 87 | Pinenek | 278.664.000 | 35.400.000 | 8.352.800 | 322.416.800 |
| 88 | Lihunu | 351.456.000 | 47.400.000 | 8.310.200 | 407.166.200 |
| 89 | Kahuhu | 254.400.000 | 35.400.000 | 7.736.900 | 297.536.900 |
| 90 | Libas | 254.400.000 | 35.400.000 | 7.926.700 | 297.726.700 |
| 91 | Likupang Kampung Ambong | 327.192.000 | 47.400.000 | 7.933.300 | 382.525.300 |
| 92 | Kinunang | 230.136.000 | 35.400.000 | 7.705.500 | 273.241.500 |
| 93 | Resetlemen | 230.136.000 | 35.400.000 | 7.674.800 | 273.210.800 |
| 94 | Ehe | 254.400.000 | 35.400.000 | 7.900.000 | 297.700.000 |
| Sub Total | | 5.452.704.000 | 781.200.000 | 143.123.300 | 6.377.027.300 |
| Kecamatan Kalawat | | | | | |
| 95 | Suwaan | 327.192.000 | 59.400.000 | 8.000.600 | 394.592.600 |
| 96 | Kuwil | 327.192.000 | 35.400.000 | 7.787.100 | 370.379.100 |
| 97 | Kawangkoan | 351.456.000 | 59.400.000 | 7.962.300 | 418.818.300 |
| 98 | Kolongan | 351.456.000 | 59.400.000 | 7.897.000 | 418.753.000 |
| 99 | Maumbi | 424.248.000 | 59.400.000 | 7.928.100 | 491.576.100 |
| 100 | Kaleosan | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.815.000 | 321.879.000 |
| 101 | Watutumou | 545.568.000 | 59.400.000 | 7.981.500 | 612.949.500 |
| 102 | Kolongan Tetempangan | 448.512.000 | 59.400.000 | 7.778.800 | 515.690.800 |
| 103 | Kawangkoan Baru | 497.040.000 | 59.400.000 | 7.613.800 | 564.053.800 |
| 104 | Kalawat | 448.512.000 | 59.400.000 | 7.519.000 | 515.431.000 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 105 | Watutumou Dua | 448.512.000 | 59.400.000 | 7.584.300 | 515.496.300 |
| 106 | Watutumou Tiga | 399.984.000 | 59.400.000 | 7.565.300 | 466.949.300 |
| Sub Total | | 4.848.336.000 | 664.800.000 | 93.432.800 | 5.606.568.800 |
| Kecamatan Talawaan | | | | | |
| 107 | Paniki Atas | 448.512.000 | 59.400.000 | 7.904.500 | 515.816.500 |
| 108 | Kolongan | 399.984.000 | 47.400.000 | 7.831.900 | 455.215.900 |
| 109 | Talawaan | 497.040.000 | 59.400.000 | 8.077.800 | 564.517.800 |
| 110 | Mapanget | 715.416.000 | 59.400.000 | 8.828.100 | 783.644.100 |
| 111 | Wusa | 351.456.000 | 47.400.000 | 7.689.100 | 406.545.100 |
| 112 | Warisa | 302.928.000 | 35.400.000 | 7.628.700 | 345.956.700 |
| 113 | Tumbohon | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.841.100 | 321.905.100 |
| 114 | Winetin | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.739.700 | 321.803.700 |
| 115 | Patokaan | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.821.300 | 321.885.300 |
| 116 | Teepwarisa | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.714.700 | 321.778.700 |
| 117 | Warisa Kampung Baru | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.851.500 | 321.915.500 |
| 118 | Paniki Baru | 327.192.000 | 47.400.000 | 7.706.400 | 382.298.400 |
| Sub Total | | 4.435.848.000 | 532.800.000 | 94.634.800 | 5.063.282.800 |
| Kecamatan Likupang Selatan | | | | | |
| 119 | Kokoleh Satu | 278.664.000 | 35.400.000 | 7.703.900 | 321.767.900 |
| 120 | Kokoleh Dua | 254.400.000 | 35.400.000 | 7.976.400 | 297.776.400 |
| 121 | Paslaten | 278.664.000 | 35.400.000 | 8.002.800 | 322.066.800 |
| 122 | Kaweruan | 278.664.000 | 35.400.000 | 8.077.300 | 322.141.300 |
| 123 | Wangurer | 302.928.000 | 35.400.000 | 7.755.100 | 346.083.100 |
| 124 | Batu | 399.984.000 | 47.400.000 | 8.149.700 | 455.533.700 |
| 125 | Werot | 278.664.000 | 35.400.000 | 8.054.300 | 322.118.300 |
| Sub Total | | 2.071.968.000 | 259.800.000 | 55.719.500 | 2.387.487.500 |
| Jumlah Total | | 44.587.128.000 | 5.721.000.000 | 999.708.800 | 51.307.836.800 |

BUPATI MINAHASA UTARA



JOUNE JAMES ESAU GANDA

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Bupati | D.h. mohon diandatangani |
| Wakil Bupati | <i>f</i> |
| Pj. Sekretaris Daerah | <i>rd</i> |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | <i>7</i> |
| Kabag Hukum | <i>rx</i> |
| Kadis Sosial PMD | <i>A</i> |
| Sekretaris Dinas Sosial PMD | <i>S</i> |
| Kabid Pemerintahan Desa | <i>R</i> |